

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN
AKHIR (TPA) MUARA FAJAR OLEH BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Tri Nugroho
NPM : 147110139

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis

dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S. Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Lilis Suryani, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014; terima kasih atas semuanya.

Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

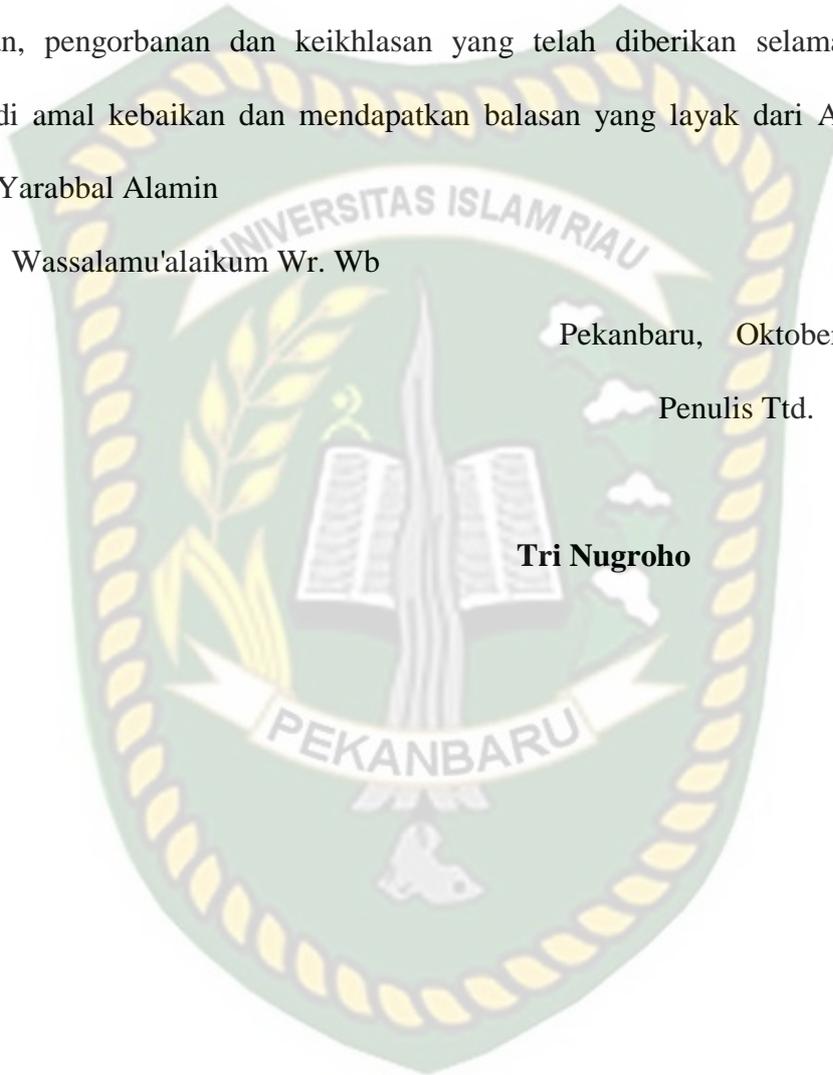
Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon serauga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis Ttd.

Tri Nugroho



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
B. Kerangka Pikir.....	31
D. Hipotesis	34
E. Konsep Operasional Variabel.....	32
E. Operasional Variabel.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	40

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	42
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	62
C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	50
D. Sumber Daya Organisasi	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	70
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Dengan Sistem Pembuangan Open Dumping Oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru	71
C. Hambatan-Hambatan dan Upaya-Upaya yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Dengan Sistem Pembuangan Open Dumping Oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru	100

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

DAFTAR KEPUSTAKAAN	105
---------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Rekapitulasi Jumlah Sampah Yang Masuk Ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru 2016-2018.....	8
II.1 Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	35
III.1 Jadwal waktu penelitian tentang Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	40
IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan.....	51
IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan.....	52
IV.3 Data Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	68
IV.4 Data Sumber Daya Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	68
V.1 Identitas Informan Penelitian	70

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Nugroho
NPM : 147110139
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI 1.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2019
Pelaku Pernyataan,



Tri Nugroho

**ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
(TPA) MUARA FAJAR OLEH BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh

TRI NUGROHO

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan, Sampah

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan suatu upaya pengelolaan sampah diperkotaan yang menggunakan prinsip pemanfaatan sampah menjadi hal yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui proses pengumpulan sampah, pengelolaan sampah dan daur ulang yang efektif. Pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya. TPA Muara Fajar merupakan TPA Sampah dengan lingkup regional yang terletak di Kecamatan Rumbai, Kelurahan Muara Fajar, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pengolahan sampah pada TPA Muara Fajar menerapkan sistem *sanitary landfill* yaitu *Sanitary landfill* adalah sistem TPA yang paling maju saat ini dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pengelolaan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan hambatan-hambatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pengawas, Mandor dan Tenaga Kerja TPA Muara Fajar. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana. Pelaksanaan sistem pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena lemahnya pengawasan terhadap petugas, dimulai dari input sampah ke TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru melalui proses *sanitary landfill* yaitu dengan proses penimbunan. Proses ini berdampak pencemaran lingkungan berupa tanah dan sumber air tanah di sekitar wilayah TPA apabila tidak dikelola dengan baik dalam jangka panjang.

**ANALYSIS OF WASTE MANAGEMENT IN THE FINAL DISPOSAL PLACE
(TPA) MUARA DAWN BY FIELD MANAGEMENT FIELD
ENVIRONMENTAL AND CLEANLINESS OFFICES
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

By

TRI NUGROHO

Keywords: Analysis, Management, Waste

Sustainable waste management is an urban waste management effort that uses the principle of waste utilization to be useful for meeting the needs of the community in terms of consumption and maintaining environmental sustainability through the process of garbage collection, effective waste management and recycling. Waste management in the city of Pekanbaru has not implemented a well-integrated concept from one stage to another. Muara Fajar TPA is a regional-level Trash Disposal Site located in Rumbai District, Muara Fajar Village, Pekanbaru City. The implementation of waste management in Muara Fajar TPA applies a sanitary landfill system, which is the Sanitary landfill is the most advanced landfill system at this time where garbage is systematically stored and disposed of. The purpose of this research is the implementation of management of the final processing site with an open dumping disposal system by the Waste Management and Final Section of the City of Pekanbaru and obstacles. The method used is descriptive and qualitative methods; informants in this study were the Section Head of Waste Management and Final Processing in Pekanbaru City, Superintendent, Foreman and Muara Fajar TPA Workers. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This study concludes that the analysis of waste management at Muara Fajar's final landfill (TPA) by the Pekanbaru City Environment and Sanitation Department's Waste Management Division in the category is quite accomplished. The implementation of the waste management system at the final disposal site has not been fully implemented properly due to the weak supervision of the staff, starting from the input of waste to the Muara Fajar TPA Pekanbaru City through the sanitary landfill process, namely the landfill process. This process has an impact on environmental pollution in the form of land and groundwater sources around the landfill area if not managed properly in the long run.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, dengan perannya yang cukup besar

Kota Pekanbaru berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap menerima segala konsekuensi pertumbuhan yang tercipta. Pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru juga disebabkan oleh imigrasi yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang datang dari luar ke dalam dimana salah satu faktornya adalah untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan dapat kita prediksi akan muncul permasalahan baru yang dihadapi kota Pekanbaru salah satunya permasalahan kebersihan ataupun sampah. Sampah menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2000 Tentang Retribusi Sampah BAB I Pasal satu adalah segala barang/benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/dimanfaatkan atau segala benda, barang/bahan yang tidak dapat digunakan dan atau dipelihara secara patut. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa sampah adalah benda/barang yang sudah tidak bernilai dan berguna dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena itu jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di kota Pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru harus menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, bahwa dalam pengelolaan sampah di perlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara spesifik. Pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan antara lain :

- a. Agar pengelolaan ini dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat.
- b. Agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan
- c. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien

Dengan demikian diperlukan suatu upaya terobosan pengolahan sampah, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengurangan sampah semaksimal mungkin, maka kegiatan pengurangan sampah tersebut meliputi 3 prinsip yaitu pertama, Reduce yaitu upaya mengurangi volume sampah, kedua, Reuse yaitu upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat, ketiga, Recycle yaitu upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat, atau disebut dengan konsep 3R. Lembaga pemerintah ditugaskan menangani permasalahan sampah di Kota Pekanbaru adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau yang sering disingkat DKP. Khusus untuk mengatasi permasalahan kebersihan kota dan juga TPA. DKP membentuk unit kerja yakni bidang kebersihan kota. Berpedoman kepada :

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Oleh karena itu dapat kita lihat tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 5 tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

- e. Mendotong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan mengani sampah; dan
- g. Melakukan kbofdinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dirias Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Pada peraturan ini pengelolaan sampah terdapat pada pasal 15 menjelaskan Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk,
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping,
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah,
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- o. Pelaksanaan perencanaan, perryediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

TPA Muara Fajar merupakan salah satu tempat pembuangan akhir sampah di kota Pekanbaru, yang berdiri pada tahun 1987, dengan luas area 8,6 hektar yang

berada di daerah Rumbai. TPA tersebut dikelola oleh pemerintah kota Pekanbaru. Pada awal pembukaan lahan, TPA Muara Fajar menerapkan metode *controlled landfill* dalam pengolahan sampah, hal ini ditandai dengan adanya saluran *drainase* untuk mengendalikan air hujan, saluran pengumpul lindi (*leachate*), kolam penampung, fasilitas pengendalian gas metan dan lain-lain.

Pada saat ini pelaksanaan pengolahan sampah pada TPA Muara Fajar menerapkan sistem *sanitary landfill* yaitu *Sanitary landfill* adalah sistem TPA yang paling maju saat ini dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi, di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi. penanganan sampah dengan menggunakan *sanitary landfill* tetap memiliki buangan berupa berbagai macam bentuk gas serta cairan. Apabila buangan gas dan cairan ini tidak dikelola dengan baik, sampah tetap akan menjadi masalah. Selain itu, penggunaan *sanitary landfill* juga harus mempertimbangkan berapa lama sebuah tempat pembuangan akhir (TPA) itu dapat dipergunakan, serta di mana kemungkinan TPA pengganti, dan juga pengolahan sampah menggunakan sistem *sanitary landfill* memiliki kerugian sebagai berikut :

1. Dapat merosot menjadi tempat sampah terbuka jika tidak dirancang dan diatur dengan baik.
2. Memerlukan lokasi yang sangat luas.

3. Sulit menentukan lokasi oleh karena penolakan penduduk dan harga tanah yang naik
4. Menyebabkan polusi air, produksi metana dari dekomposisi limbah, dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau resiko ledakan material yang membahayakan warga di sekitar TPA
5. Membawa limbah/sampah ke lokasi yang jauh memerlukan biaya mahal.

Sampah dari hasil masyarakat tersebut akan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Berikut ini dapat dilihat jumlah penimbunan sampah perhari berdasarkan kecamatan di Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Jumlah Penimbunan Sampah Per hari Berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Timbunan Sampah
1	Sukajadi	6.168,53
2	Rumbai	9.220,26
3	Tenayan Raya	32.925,90
4	Rumbai Pesisir	7.893,26
5	Sail	1.942,56
6	Lima Puluh	5.408,52
7	Tampan	40.599,07
8	Bukit Raya	22.295,90
9	Pekanbaru Kota	3.707,64
10	Marpoyan Damai	26.832,51
11	Payung Sekaki	23.223,90
12	Senapelan	4.855,14
Total		185.073,18

Sumber : Masterplan TPA Regional Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel diatas mengenai laju timbulan sampah permukiman di Kota Pekanbaru, laju paling tinggi untuk jenis permukiman sederhana berada di Kecamatan Tampan yaitu sebesar 40.599,07 liter/hari. Setelah sampah-sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) penuh, akan di angkut menggunakan truck

seperti dumptruck, armroll, pick up dan kaisar, yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Tidak hanya itu, sampah-sampah hasil industri dan sampah pasar pun juga di angkut setiap harinya yang akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Berikut rekapitulasi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Sampah Yang Masuk Ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru 2016-2018

Tahun	Jumlah Sampah
2016	164.338.230 Kg
2017	148.819.353 Kg
2018	121.707.836 Kg

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru cukup besar setiap tahunnya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah harus ada sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang baik. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasiann, pergerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya lainnya. Dengan adanya manajemen pengelolaan tersebut, maka terlihat tahap demi tahap yang akan dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan sampah tersebut.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun penyelenggaraan Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada norma hukum dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan perkembangan lingkungan global, salah satunya adalah dalam pengolahan persampahan pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).

Tabel 1.3. Data Perlengkapan Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Pick Up	17
2.	Dump Truck	49
3.	Fuso	2
4.	Sweeper Road	1
Jumlah		69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2019

Jika dilihat dari perlengkapan yaitu kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dari segi jumlah dapat dikatakan belum memadai dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah seharusnya dengan luasnya wilayah Kota Pekanbaru memiliki 123 Unit kendaraan operasional dan juga banyak kondisi armada yang sudah tua, maka harus diadakan penggantian dan penambahan armada oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifitaskan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Adanya aktivitas pemulung pada lahan TPA menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan terhadap buangan sampah pada lahan TPA tidak hanya

dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun adanya aktivitas pemulung tentu saja turut membantu dalam pengurangan jumlah bobot sampah yang ada di TPA walaupun tidak terlalu signifikan. Adanya pengolahan sampah pada TPA Muara fajar berupa pemanfaatan gas methan, untuk digunakan sebagai pengganti gas LPG merupakan salah satu perubahan paradigma akan persampahan yang sebelumnya sampah cenderung untuk dibiarkan saja tanpa dilakukan pengolahan. Adapun fenomena dalam penelitian ini yaitu :

1. Proses penyiraman pada saat sampah masuk ke TPA tidak semuanya dilakukan penyiraman, mengingat cairan anti bakteri yang terbatas. Dengan kondisi demikian, usaha untuk mengurangi bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah tidak maksimal.
2. Tidak adanya tanggapan secara langsung dari pihak dinas untuk penganganan alat pengelolaan sampah seperti jalan yang rusak dan alat berat yang tidak bisa digunakan sehingga sampah tidak bisa diproses secara tepat waktu dan menyebabkan penumpukan sampah yang menjadi lebih menumpuk.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul; **“Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
2. Hambatan - hambatan apa saja yang timbul dalam Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu ;

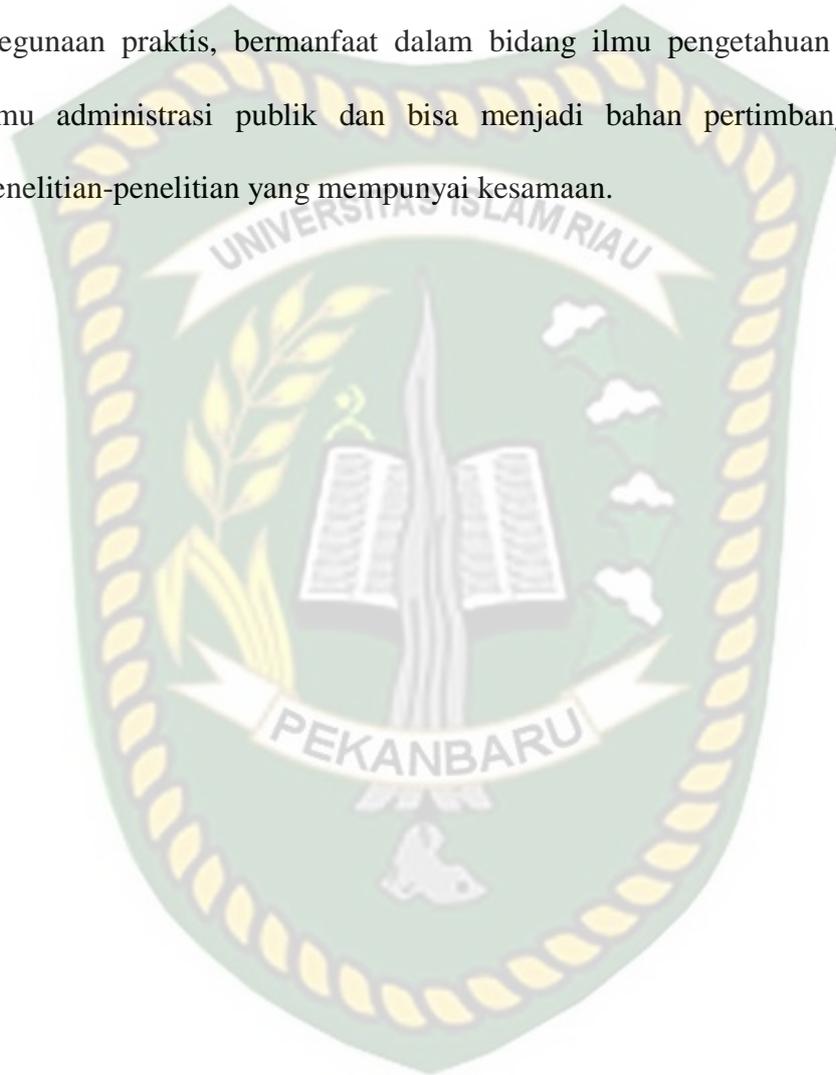
1. Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang timbul dalam Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan praktis, sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar.

2. Kegunaan teoritis, sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
3. Kegunaan praktis, bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan salah satu alat/tonggak dalam sebuah pelaksanaan pembangunan. Karena tanpa adanya pengadministrasian dengan baik maka proses pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam defines diatas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsure-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep

administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005:21-23) sebagai berikut :

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staff, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staff.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi

- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan social yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behavior*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special tpe of human behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan(*skills*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, yang memerlukan input, tranformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan *overall management* dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumber daya-sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumber daya-sumber daya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machine*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara teknik(*methods-technology*), ruang (*space*),tenaga atau energy (*energy*, dan waktu (*time*), dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta

penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Mengacu pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Seperti permasalahan pokok yang dikemukakan oleh Pasolong (2007: 2) antara lain : Siapa yang harus melayani dan dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupannya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia. Karena manusia merupakan sumber adanya kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai mahluk social yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Syaffie (2003:32) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi Negara, yaitu:

- a. Tidak dapat dielakan (*unavoidable*)
- b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*)
- c. Mempunyai prioritas (*has priority*)
- d. Mempunyai pengecualian (*has exceptional*)
- e. Puncak pimpinan politik (*top management political*)
- f. Sulit diukur (*difficult to measure*)
- g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (*more is expected of public administration*)

Menurut Siagian (2003:7) administrasi Negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, jadi tanpa adanya kerja sama suatu organisasi itu tidak dapat akan berjalan dengan baik.

2. Konsep Organisasi

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Gibson, et. Al (1996:6) mendefinisikan “organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri”.

Menurut Robbin (2000:4) “organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa : suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

1. organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
2. organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
3. organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (*hierarchy*). Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf. Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2002 : 100), mengemukakan “konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri

atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

3. Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkifli, 2005 : 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian,

dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (2006 : 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4. Konsep Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Oey Liang Lee (dalam Ranupandojo, 1996:3) mendefinisikan bahwa, “Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang-barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian tujuan, hal ini dikarekan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula.

Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya Ranupandojo (1996:11) mendefinisikan perencanaan ialah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, yang dimaksud

perencanaan dalam penelitian ini adalah proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang diawali dengan proses pengambilan keputusan tentang, apa yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara menentukan tingkat keberhasilan yang akan ditetapkan.

Pada umumnya menurut Ranupandojo (1996:21) terdapat tujuh prinsip dan petunjuk untuk menyusun perencanaan yang baik yaitu:

- a. Rencana harus memiliki tujuan yang khas.

Ini penting sebab dengan tujuan yang khas semua kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai hasil perencanaan tersebut. Tujuan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua orang yang akan melaksanakan rencana itu.

- b. Ada kegiatan yang diprioritaskan.

Suatu rencana tanpa ada kegiatan pelaksanaan, tak lebih dari selembar kertas yang tak berarti. Karena kegiatan mencapai tujuan dari suatu rencana banyak macamnya, dan disisi lain terdapat faktor-faktor pembatas, maka perlu ada kegiatan yang diberi prioritas. Kegiatan ini biasa disebut sebagai kegiatan kunci. Tanpa kegiatan kunci tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan rencana akan berjalan secara efektif dan efisien.

- c. Melibatkan semua orang.

Hendaknya semua orang dilibatkan dalam pembuatan rencana, baik untuk seluruh tahap, maupun hanya tahap-tahap tertentu dari proses perencanaan tersebut. Keterlibatan ini akan menimbulkan rasa bertanggung jawab dalam tahap pelaksanaan rencana nantinya. Dengan cara ini pelaksanaan

rencana diharapkan dapat berjalan lancar, komunikasi lancar, koordinasi juga lancar.

d. Perencanaan hendaknya telah diperhitungkan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengendalian. Hal ini penting sebab perencanaan memang merupakan fungsi yang mendahului kegiatan manajemen lainnya, sehingga rencana akan selalu memiliki sifat sebagai acuan dari fungsi manajemen lainnya.

e. Rencana harus selalu diperbaiki, karena situasi dan kondisi memang selalu berubah.

Perbaikan suatu rencana tidak berarti rencana itu salah, tetapi untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Namun demikian, suatu rencana jangan terlalu sering diperbaiki, sebab jika demikian, rencana tersebut akan sukar untuk dijadikan pedoman, baik dalam pelaksanaannya maupun untuk kepentingan pengendalian.

f. Penanggung jawab perencanaan.

Perlu ditunjuk orang atau staff khusus yang bertanggung jawab dalam penyusunan rencana. Walaupun banyak orang yang terlibat dalam penyusunan rencana, namun harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir perencanaan tersebut.

g. Semua perencanaan selalu bersifat tentatif dan bersifat interim. Rencana tidak ada yang bersifat final, sebab rencana yang baik harus memiliki keluwesan terhadap perubahan-perubahan yang ada.

Prinsip-prinsip perencanaan di atas, pada penelitian ini akan digunakan sebagai landasan dalam mengajukan wawancara guna mengetahui proses perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli.

Menurut (Sudrajat 2006:15) Pengelolaan sampah adalah dikerjakan sedemikian hingga dapat dimanfaatkan, atau diproses sedemikian hingga tidak membahayakan atau mengganggu lagi. Agar sampah ini tidak membahayakan kesehatan manusia, maka perlu pengaturan pembuangannya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah yaitu :

- a. Penyimpanannya
- b. Pengumpulan
- c. Pembuangan akhir sampah
- d. Pengolahan sampah

Menurut Andri Kristanto (2003:6) sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan. Menurut Syamsi (1994:8) sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan untuk melaksanakan fungsi.

Menurut Elias dalam buku Syamsi (1994:8) bahwa sistem adalah sebagai kelompok komponen yang teratur (yang merupakan sub sistem) yang saling berkaitan sesuai dengan rencana yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Menurut Kast dalam buku Syamsi (1994:9) sistem adalah menggabung pernyataan dari dua atau lebih bagian-bagian, komponen-komponen atau sub sistem-sub sistem yang interdependen, dan ditandai oleh batas-batas yang jelas dari lingkungan supra sistemnya.

Sedangkan menurut Jogiyanto (2005:40) sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing) dan keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam suatu sistem sebagai berikut:

1. Tujuan sistem

Merupakan tujuan dari sistem tersebut dibuat, dapat berupa tujuan organisasi, kebutuhan organisasi, permasalahan yang ada dalam suatu organisasi maupun urutan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Batasan Sistem

Merupakan sesuatu yang membatasi sistem dalam mencapai tujuan sistem tersebut, misalnya dapat berupa peraturan-peraturan yang ada dalam suatu organisasi, biaya-biaya yang dikeluarkan, orang-orang yang ada dalam organisasi, fasilitas baik itu sarana dan prasarana maupun batasan yang lain.

3. Kontrol Sistem

Kontrol sistem merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan dari sistem itu, dapat berupa kontrol terhadap masukan data (input), keluaran (output), pengolahan, umpan balik dan sebagainya.

4. Masukan / Input

Input merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh masukan, dimana masukan tersebut dapat berupa jenis data, frekuensi pemasukan dan sebagainya

5. Proses

Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang lebih berguna.

6. Keluaran / Output

Output adalah tujuan akhir sistem. Merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah. Output dapat berupa hasil dari proses pengolahan yang dilakukan oleh sebuah sistem.

Jogianto (2005:54) mengemukakan sistem mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu sub sistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sub sistem

mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batasan Sistem

Batasan sistem atau (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan ruang sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

d. Penghubung Sistem

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu sistem dengan subsistem yang lain. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lain membentuk satu kesatuan.

Sistem dapat mempunyai satu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Menurut Siswanto (2005:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di

sistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Handoko (2000:10) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: “Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan”

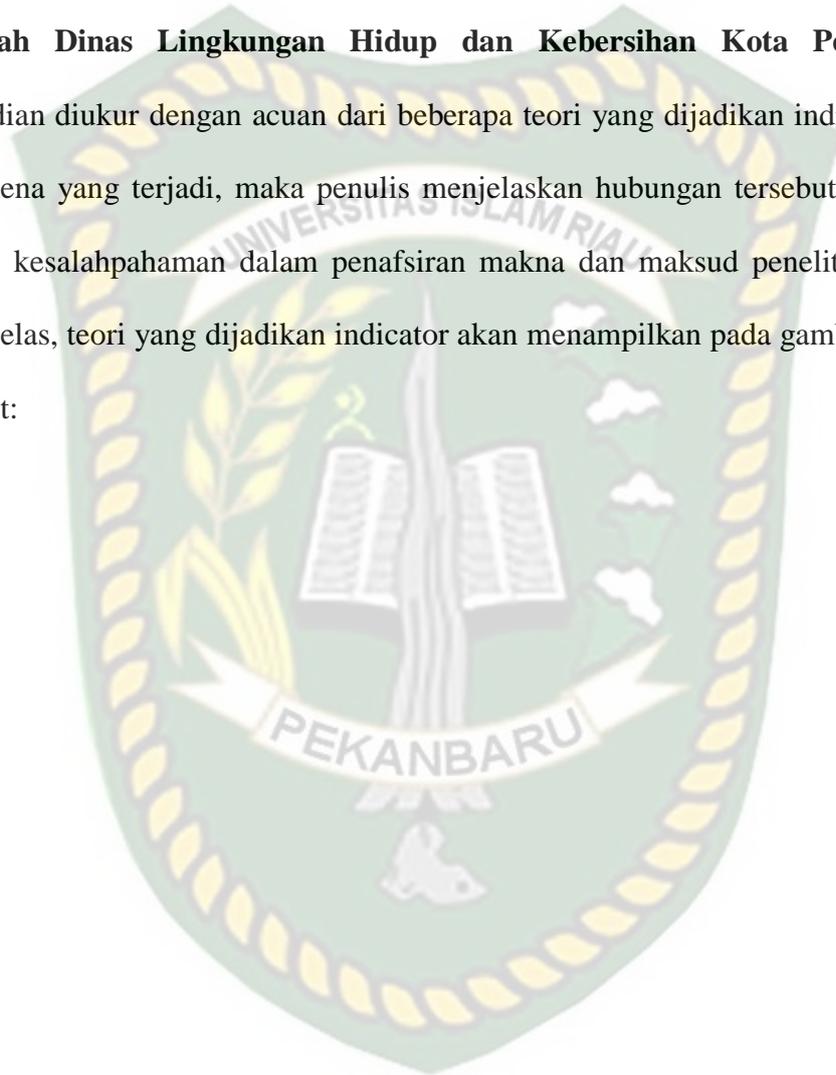
Selanjutnya Yahya (2006:2) manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat. Praktek manajemen seharusnya didasarkan atas rinsip-prinsip teori .Manajemen bukan hanya sebagai ilmu dan seni, tetapi merupakan kombinasi dari keduanya. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005:23) mengatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengendalian
4. Penempatan
5. Pengarahan
6. Pemotivasian

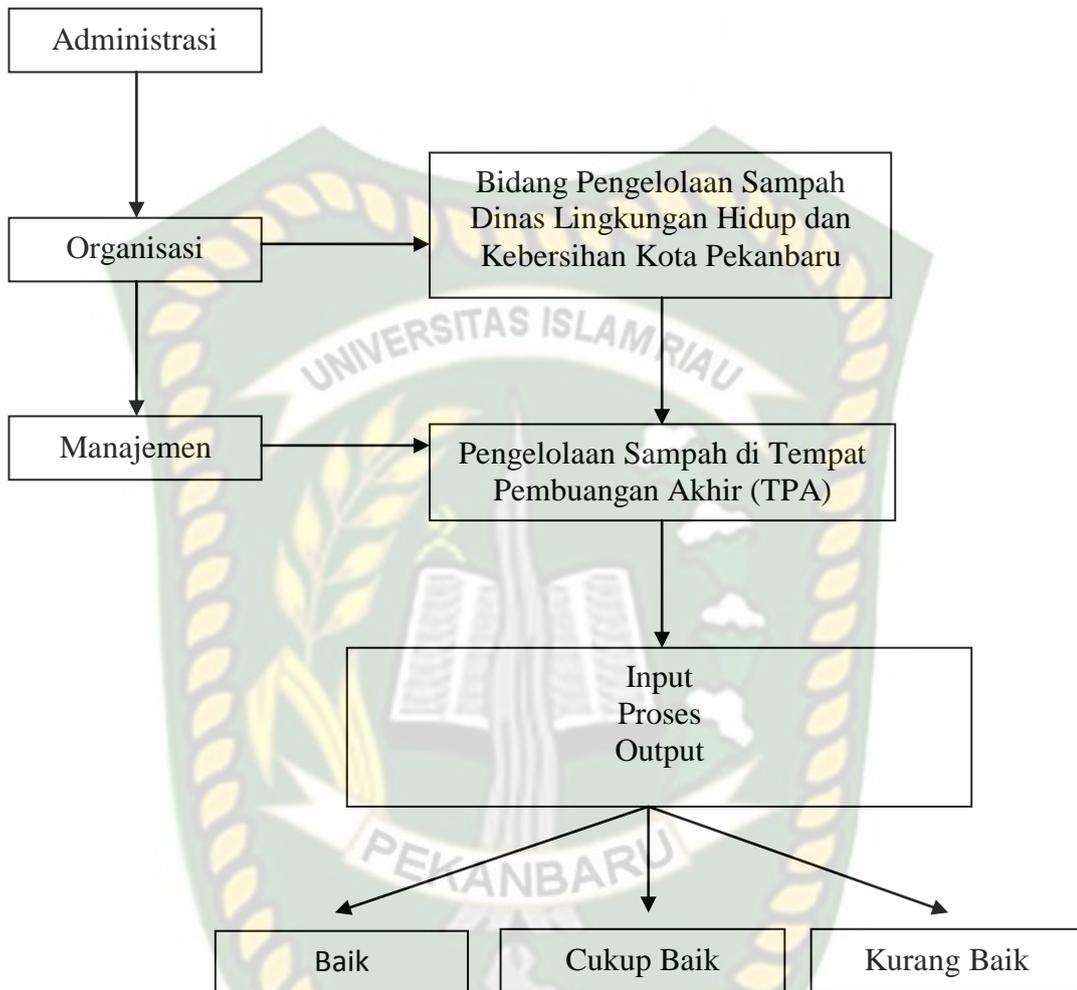
7. Komunikasi

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “**Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indicator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:



Tabel II.1 : Kerangka Pikir Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha/swasta.
3. Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Organisasi Publik adalah organisasi yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang terlegitimasi di bidang politik administrasi pemerintahan dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.
5. Manajemen adalah suatu seni atau keterampilan atau keahlian yakni “seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain”.
6. Manajemen Publik adalah suatu kinerja yang kompleks dari aktornya yakni pemerintah dan pegawai nya guna melakukan pelayanan kepada public atau masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.
7. Implementasi merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.

8. Pengelolaan sampah adalah dikerjakan sedemikian hingga dapat dimanfaatkan, atau diproses sedemikian hingga tidak membahayakan atau mengganggu lagi.
9. Masukan / Input merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh masukan, dimana masukan tersebut dapat berupa jenis data, frekuensi pemasukan dan sebagainya.
10. Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang lebih berguna.
11. Keluaran / Output adalah tujuan akhir sistem. Merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah. Output dapat berupa hasil dari proses pengolahan yang dilakukan oleh sebuah sistem.

D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
1	2	3	4	5
Pengelolaan sampah adalah dikerjakan sedemikian hingga dapat dimanfaatkan, atau diproses sedemikian hingga tidak membahayakan atau mengganggu lagi (Sudrajat 2006:15)	Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	1. Input 2. Proses 3. Output	a. Jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) b. Permasalahan yang timbul akibat tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) a. Sanitary Landfill b. Pengolahan sampah menjadi Pupuk a. Gas Metan b. Pupuk c. Lingkungan yang sehat dan tidak tercemar di sekitar kawasan TPA	Ordinal

Sumber : Olahan Penelitian, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru karena merupakan instansi yang mengatur dan mengelola persampahan di Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informant

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian

sebagaimana yang dijelaskan oleh Anikunto (2006;145) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Informan penelitian melalui *key informan* dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. *purposive sampling* menurut Djaman satori (2007;6) teknik pengambilan sampling yang ditetapkan dengan menyesuaikan pada tujuan atau pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru
2. Pengawas TPA Muara Fajar
3. Mandor TPA Muara Fajar
4. Tenaga Kerja TPA Muara Fajar

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :
 1. Identitas responden serta hasil tanggapan responden mengenai Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

2. Hambatan-hambatan dalam Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :
1. Gambaran umum Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
 2. Jumlah pegawai
 3. Tingkat pendidikan pegawai

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Observasi dilakukan pada Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar.

3. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999 : 149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap dan menuntaskan masalah-masalah agar dapat dipahami dan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian tersebut, agar dapat di peroleh gambaran yang jelas.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																Ket								
		April				Mei				Juni				Juli					Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																			
2	Seminar UP							x	x	x	x															
3	Perbaikan UP											x	x													
4	Perbaikan daftar kuisioner													x												
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x									
6	Penelitian Lapangan																x									
7	Penelitian dan analisis data																	x	x							
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																			x						
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																				x	x				
10	Ujian Skripsi																					x				
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																						x	x		
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																								x	

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Awal mula Kota Pekanbaru berkembang tidak lupa dari manfaat Sungai Siak yaitu tempat sarana transportasi. Ketika tepat abad ke 18, wilayah Senapelan yang terletak di sebelah Sungai Siak, menjadi pasar oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Minangkabau. Seiring waktu yang berjalan, daerah tersebut mengalami perkembangan dan menjadi ramai. Tepat tanggal 23 Juni 1784, kawasan ini di beri nama Pekanbaru dengan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), daerah ini diberi nama Pekanbaru, dengan kemudian hari akan diperingati hari jadinya kota tersebut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru

menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	27.059	2.68 %
2.	Senapelan	38.183	3.78 %
3.	Sukajadi	49.336	4.88 %
4.	Limapuluh	43.982	4.35 %
5.	Sail	22.956	2.27 %
6.	Rumbai	73.231	7.24 %
7.	Rumai pesisir	72.970	7.21 %
8.	Bukit Raya	106.161	10.50 %
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09 %
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00 %
11.	Tampan	194.331	19.21 %
12.	Payung sekaki	99.170	9.80 %
JUMLAH		1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertumbuhan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk Kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di Kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran

pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif sertamendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan danayang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas dan saran-saran sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang

beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyanggah nama seorang tokoh legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru merupakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, sasaran organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta didukung pula oleh Keputusan Walikota Pekanbaru tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kasi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Kasi Sarana dan Prasarana.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang teknis yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya, serta Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Adapun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau, Indah dan Gemerlap menuju Kota Metropolitan yang Madani”.Kemudian misi terdiri dari:

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih
2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Hijau

3. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Indah
4. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Gemerlap
5. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Madani
6. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Metropolitan

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan.
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kemsakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan.
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Pnaatan dan Peningkatan[^] Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan.
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan jumlah pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diluar dari jumlah tenaga harian lepas itu sendiri berjumlah 69 orang, hal ini dapat dilihat dari keterangan tabel dibawah ini:

Tabel. IV.3. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kasubbag	3 orang
	Staf	10 orang
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	15 orang
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	17 orang
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	3 orang
7.	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang

NO	JABATAN	JUMLAH
	Staf	3 orang
JUMLAH		69 orang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2019

C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Selanjutnya dalam sebuah organisasi manapun tentunya memiliki struktur sebagai susunan terhadap hirarki jabatan suatu organisasi, mengenai struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. Adapun fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, antara lain:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- b. perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- c. pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- d. perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- e. penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- f. pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- g. penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas.
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

- j. pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- k. pengelolaan keuangan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok sekretaris merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sekretaris meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Tugas pokok sub bagian umum adalah merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Fungsi sub bagian umum meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundangundangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. pelaksanaan urusan keprptokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas,
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (EMD),
- g. pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.

- h. perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Unit Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok sub bagian keuangan adalah merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sub bagian keuangan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- e. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- f. penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- g. pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventerisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h. pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukli kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

5. Sub Bagian Program

Tugas pokok sub bagian program adalah merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sub bagian program meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Lingkungan

Tugas pokok bidang tata lingkungan membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tata lingkungan. Fungsi bidang tata lingkungan meliputi:

- a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
- b. pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota.
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan,
- d. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion.
- e. pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis.
- f. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup.
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai amdal.
- i. perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan.

- j. perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK),
- k. pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota.
- l. perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- m. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- n. pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

- a). Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan
- b). Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
- c). Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

7. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas pokok bidang pengelolaan sampah adalah membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan sampah. Fungsi bidang pengelolaan sampah meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota,
- b. perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
- c. perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- e. perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- f. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- g. pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- h. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping,
- i. perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- j. perumusan pembenan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- k. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

1. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- m. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- n. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- q. pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

- a). Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
- b). Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
- c). Seksi Sarana dan Prasarana

8. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi:

- a. perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).
- d. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- e. pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. pelaksanaan Sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar.
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberiaa peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.
- j. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah

bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota.

- k. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota,
- l. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha/kegiatan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:

- a). Seksi Pemantauan Lingkungan
- b). Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- c). Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

9. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas pokok Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Fungsi Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- c. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah
- f. perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.

- i. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
 - j. pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup.
 - k. pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan.
 - l. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari
- a). Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - b). Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan
 - c). Seksi Retribusi dan Penagihan

D. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi secara umum dapat dikatakan manusia, dana dan peralatan untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi, begitu juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai sebuah organisasi pemerintah memiliki sumber daya organisasi yang salah satunya ialah Manusia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. IV.5. Data Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2,	Setataris	1
3.	Subbagian	3
4.	Kepala Bidang	4
5.	Kepala Seksi	12
6.	Staf	48
Jumlah		69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup memadai dari segi jumlah. Kemudian untuk mendukung pengelolaan sampah dikota Pekanbaru maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki 678 Tenaga Harian Lepas untuk operasional dilapangan, kemudian untuk melihat sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. IV.6. Data Sumber Daya Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Pick Up	17
2.	Dump Truck	49
3.	Fuso	2
4.	Sweeper Road	1
Jumlah		69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018

Jika dilihat dari perlengkapan yaitu kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dari segi jumlah dapat dikatakan belum memadai dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah

seharusnya dengan luasnya wilayah Kota Pekanbaru memiliki 123 Unit kendaraan operasional dan juga banyak kondisi armada yang sudah tua, maka harus diadakan penggantian dan penambahan armada oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifitaskan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Deskripsi identitas informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Deskripsi identitas informan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
1.	H. Amir Husni, ST	Laki-laki	42 Tahun	Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah
2.	Mar Bujang	Laki-laki	39 Tahun	Pengawas Persampahan
3.	Aceng	Laki-laki	30 Tahun	Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru
4.	Edian Ady	Laki-laki	30 Tahun	Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru

Sumber : Olahan Data Penulis dari Hasil Wawancara, 2019

Dari data identitas informan tersebut diketahui informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang peneliti ketahui khusus menangani proses pengolahan persampahan sampai pada ke TPA. Dengan informan yang digunakan ini peneliti memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan sehingga dapat memperoleh hasil yang sebagaimana diharapkan.

B. Hasil Penelitian Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Menurut Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, dengan perannya yang cukup besar Kota Pekanbaru berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap menerima segala

konsekuensi pertumbuhan yang tercipta. Pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru juga disebabkan oleh imigrasi yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang datang dari luar ke dalam dimana salah satu faktornya adalah untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan dapat kita prediksi akan muncul permasalahan baru yang dihadapi kota Pekanbaru salah satunya permasalahan kebersihan ataupun sampah. Sampah menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2000 Tentang Retribusi Sampah BAB I Pasal satu adalah segala barang/benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/dimanfaatkan atau segala benda, barang/bahan yang tidak dapat digunakan dan atau dipelihara secara patut. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa sampah adalah benda/barang yang sudah tidak bernilai dan berguna dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena itu jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di kota Pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru harus menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, bahwa dalam pengelolaan sampah di perlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara spesifik.

Kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang *open dumping* menyebabkan kecenderungan mencemari

lingkungan sangat tinggi. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah apabila suatu daerah masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) dalam pengelolaan TPA sampahnya, maka Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini, yaitu 7 Mei 2013 dan harus menerapkan sistem *sanitary landfill*.

Saat ini TPA Kota Pekanbaru di wilayah Muara Fajar masih menggunakan system *open dumping*. Hal ini menyebabkan pencemaran sistem air bawah tanah oleh air lindi dan arah pergerakannya dominan berada di bagian utara dan barat TPA. Kualitas air sumur gali penduduk di sekitar TPA Muara Fajar mengandung Besi (Fn) dan Seng (Zn) yang sudah melebihi ambang batas. Sementara konsentrasi krom dan sianida dalam air lindi juga sudah melewati ambang batas yang ditetapkan. Adanya pencemaran lingkungan yang dihadapi, menyebabkan persepsi masyarakat di sekitar lokasi TPA terhadap wilayah yang bersangkutan menjadi buruk dan terjadi konflik antara masyarakat dengan pengelola TPA karena bau yang ditimbulkan dari sampah tersebut.

Proses pengolahan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan, pemulung dan beberapa masyarakat di Kota Pekanbaru dengan proses pengumpulan sampah, pengangkutan, penimbunan dan pemrosesan menjadi kompos. Pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan: Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa unit pengolahan kompos yang ikut berperan untuk mengurangi sampah makanan atau sampah organik. Dimana sampah – sampah tersebut dilakukan pengolahan ke dalam beberapa tahapan

mulai dari pengumpulan, pencacahan, pengayakan, penjemuran dan pembusukan sehingga sampah – sampah organik tersebut menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya.

Selain di dalam unit pengolahan kompos, sampah makanan di Kota Pekanbaru juga tereduksi dengan peran pemulung dalam menggunakan sampah makanan sebagai pakan ternak. Dari survey yang dilakukan di TPS dan hasil wawancara dengan beberapa pemulung, sampah makanan atau sampah basah sudah diambil oleh pemulung untuk digunakan sebagai makanan ternak.

Berikut dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru:

B.1. Penyimpanan

Penyimpanan adalah proses setelah dikumpulkannya sampah yang sudah diangkut dan dibawa ke TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru. Setiap sampah yang masuk akan dilakukan penyiraman cairan anti bakteri terlebih dahulu agar sampah tersebut tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. tetapi kenyataan di lapangan sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis, bau menyengat apalagi disaat musim penghujan tiba masih saja tercium dan tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan pada saat bernafas. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lapangan ditemukan, bahwa proses penyiraman pada saat sampah masuk ke TPA tidak semuanya sampah yang sudah tertimbun dilakukan penyiraman, mengingat cairan anti bakteri yang terbatas. Dengan kondisi

demikian, usaha untuk mengurangi bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah tidak maksimal.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Standar yang ditetapkan antara lain yaitu pembuangan sampah yang teraur dan sesuai tempatnya serta pengolahan sampah secara optimal dan dikelola dijadikan pupuk kompos atau daur ulang sampah. Permasalahan yang terjadi yaitu dalam penyimpanan sampah ini tidak dilakukan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa tempat penampungan sampah yang selalu tidak dalam keadaan bersih bahkan tidak dibersihkan. Hal ini dapat terjadi karena terlambatnya atau tidak bekerjanya petugas kebersihan sampah setiap harinya, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak enak.

Padahal masyarakat mengaku membayar retribusi persampahan/kebersihan di Kota Pekanbaru responden sudah tepat pada waktunya dan sesuai dengan tariff yang ditentukan pihak Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah, tetapi dampak dari pembayaran retribusi persampahan/kebersihan tersebut tidak pada

pembangunan lingkungan rumah tangga yang terjadi sampai pada saat ini. Responden masih bertanggung sarana dan prasarana yang tersedia khususnya pada Lingkungan rumah tangga masih perlu perhatian besar, misalnya seperti bangunan kios-kios pada lingkungan rumah tangga yang jumlahnya minim sehingga masih banyak masyarakat lingkungan rumah tangga yang berjualan dipinggir-pinggir atau emperan lingkungan rumah tangga. Kemudian mengenai penentuan tarif serta prosedur atau syarat mengenai retribusi persampahan/kebersihan lainnya juga kurang dimengerti masyarakat karena tidak ada penjelasan khusus dari pihak Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah. Sehingga sering terjadi pertanyaan besar bagi responden dalam melakukan pembayaran retribusi persampahan/kebersihan.

Menurut Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11Maret 2019, dengan pertanyaan bagaimana penetapan standar dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“sebagai pihak yang menyelenggarakan pengelolaan sampah dan mengawasi smapah maka kami telah menetapkan standar sesuai dengan penetapan program yang akan dilakukan setiap tahunnya dan kami bekerja sama dengan pegawai lainnya serta tenaga kebersihan untuk mewujudkan kebersihan kota serta sampah hingga dapat mengelola sampah tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana penetapan standar dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“kalau masalah pengangkutan sampah menurut saya sudah dilakukan dengan optimal karena armada sudah banyak yang mengangkut sampah dan bukan dari dinas saja tapi juga dari dua perusahaan pengangkutan sampah lainnya yang sangat membantu, akan tetapi kita terkendala oleh rusaknya alat berat untuk melansir sampah sehingga sampah di TPA ini sudah sangat menumpuk. Apalgi sekarang ini sudah ada TPA yang baru dibangun agar dapat menjadi pembuangan sampah yang bisa optimal pengolahannya akan tetapi saranaa listrik yang belum bisa masuk. Jadi masih banyak kendala yang ditemui di TPA ini”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana penetapan standar dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau standar dalam penimbangan ini tidak ada karena semua sampah yang masuk wajib dilakukan penimbangan agar dibuat laporan sesuai dengan sampah yang akan dikelola. Akan tetapi yang penting pembuangan sampah sesuai dengan tempat dan lokasinya”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara FajarKota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana penetapan standar dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“standar pembuangan sampah disini ya seperti itu saja, datang ke TPA membuang sampah pada lokasi yang ditentukan lalu dilakukan penyemprotan bakteri dan mengambil kertas hasil timbangan sebagai bukti telah melakukan pembuangan pada TPA ini”.

Kebijakan program persampahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Yaitu kebijakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Tingkat pelayanan yang 40% pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong/sungai. Banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Sementara itu berbagai komitmen internasional sudah disepakati untuk mendorong peningkatan pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Sasaran peningkatan pelayanan nasional pada tahun 2015 yang mengarah pada pencapaian 70% penduduk juga telah ditetapkan bersama. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1) : Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan. Rendahnya tingkat pelayanan pengumpulan sampah sering diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan armada pengangkut. Banyak kota masih mengoperasikan truck sampah dengan ritasi tidak efisien (tidak lebih dari 2 rit / hari). Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan ritasi kendaraan pengangkut dan peralatan lainnya sehingga lebih banyak sampah terangkut dan lebih banyak masyarakat dapat terlayani.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Pelaksanaan evaluasi kinerja prasarana dan sarana persampahan
- Penyusunan pedoman manajemen asset persampahan

Strategi (2) : Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. Pelayanan juga diharapkan dapat disediakan dengan jangkauan yang memberikan rasa keadilan. Disamping pusat kota yang mendapat prioritas, pelayanan juga tetap harus disediakan bagi masyarakat kelas ekonomi rendah agar mereka juga dapat menikmati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Perluasan jangkauan pelayanan juga harus dilakukan secara terencana dan terprogram dengan baik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Strategi (3) : Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran Pelayanan. Dalam batas pemanfaatan optimal telah tercapai dan masih dibutuhkan peningkatan cakupan pelayanan maka akan diperlukan adanya peningkatan kapasitas sarana persampahan khususnya armada pengangkutan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penambahan sarana persampahan khususnya armada pengangkut sampah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Strategi (4) : Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. Pengelolaan TPA yang buruk dibanyak kota harus diakhiri dengan upaya peningkatan pengelolaan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. TPA yang jelas-jelas telah menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitarnya perlu segera

mendapatkan langkah-langkah rehabilitasi agar permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diminimalkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan sesuai dengan prioritas.

Strategi (5) : Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill. Serta TPA yang masih dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas dan pengelolaan mengarah pada metode *sanitary landfill* dan *controlled landfill* agar tidak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman peningkatan pengelolaan TPA yang sangat diperlukan oleh daerah untuk perbaikan fasilitas persampahan yang dimiliki.

Strategi (6) : Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. Kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh. Kerjasama pengelolaan TPA dengan kota/kabupaten lainnya akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah : Penyusunan studi lokasi dan kelayakan pengembangan TPA regional sesuai Tata Ruang dan Uji coba pengelolaan TPA regional secara professional.

Strategi (7) : Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan. Kekeliruan dalam pemilihan teknologi seperti insinerator tungku yang banyak dilakukan oleh

Pemerintah Daerah perlu segera dihentikan dengan memberikan pemahaman akan kriteria teknisnya. Disamping itu juga sangat diperlukan aktivitas penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan teknologi yang paling sesuai dengan kondisi sampah di Indonesia pada umumnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Maret 2019, dengan pertanyaan apakah sudah melakukan pengecekan rutin pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“kalau saya hanya menerima laporan dari TPA yang menyatakan bahwa dalam laporan tersebut dikatakan jumlah sampah yang masuk dan sudah diproses, kami juga memperoleh laporan keadaan TPA serta permasalahan fasilitas atau akomodasi yang rusak untuk dilakukan perbaikan. Jadi kami tidak melakukan pengecekan langsung dilapangan hanya diberikan laporan saja oleh mandor ataupun pengawas”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan apakah sudah melakukan pengecekan rutin pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“tugas saya memang untuk mengecek dan membuat nlaporan mengenai permasalahan dalam pengelolaan sampah ini, saya sebagai mandor disini harus bersedia untuk memeriksa semua permasalahan yang terjadi dan kemudian melaporkannya melalui pengawas maupun pihak dinas terkait”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan apakah sudah melakukan pengecekan rutin pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“saya yang bertugas melakukan penimbangan wajib untuk selalu mengecek alat timbangan yang akan digunakan agar pembuangan sampah dapat beroperasi setiap harinya. Jika alat timbangan ini rusak maka tidak akan ada kegiatan pembuangan sampah pada TPA ini, hal ini tentu saja berdampak pada penumpukan sampah dan tidak dapat diproses. Oleh karena itu pemeriksaan alat timbangan harus dilakukan setiap saat jangan sampai terjadi kerusakan”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan apakah sudah melakukan pengecekan rutin pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“saya tidak rutin selalu berada di TPA karena saya memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan lainnya, misalnya penyapuan jalan dan pembersihan selokan-selokan. Oleh karena itu saya bekerja sama dengan mandor di TPA untuk berkoordinasi dalam penanganan permasalahan TPA jika ada terjadi masalah dan saya juga rutin datang ke TPA untuk melakukan pengecekan akan tetapi tidak dalam waktu yang ditetapkan”.

Kemudian hasil observasi yaitu penampungan sampah setiap harinya harus dilakukan secara rutin agar penyimpanan sampah ke TPA Muara Fajar dapat dilakukan secara optimal. Apabila penyimpanan ini dilakukan tidak secara optimal maka akan berdampak pada kebersihan kota yang tidak rapi dan menimbulkan bau yang tidak enak. Disini petugas kebersihan sangat berperan penting sehingga Kota Pekanbaru dapat menjadi kota yang bersih dan nyaman.

B.2. Pengumpulan

Pengumpulan sampah dilakukan di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru dan dilakukan Sanitary Landfill. Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan menjadi suatu yang lebih berguna. Proses disini adalah pengolahan sampah yang dibuang di TPA yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Dalam melakukan

pengolahan sampah di Tempat Pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru menggunakan sistem *sanitary landfill* yaitu *Sanitary landfill* adalah sistem TPA dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi, di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi. Penanganan sampah dengan menggunakan *sanitary landfill* tetap memiliki buangan berupa berbagai macam bentuk gas serta cairan. proses pengolahan sampah yang dilakukan dengan sistem konversi yang keseluruhannya dikenal dengan proses *Sanitary Landfill* tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kendala sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal pengolahan sampah yang menghasilkan gas metan. Selain itu, peralatan yang tidak memadai dan ditemukan beberapa alat yang rusak tentu menjadi penghambat dalam proses pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana pencatatan pengawasan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“masuknya sampah di TPA Muara Fajar menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga kondisi seperti ini sangat dikeluhkan oleh warga sekitar, karena tidak nyamannya dalam menghirup udara yang dibutuhkan tubuh dalam proses pernafasan. Sementara itu, petugas di TPA Muara Fajar menjelaskan bahwa setiap sampah yang masuk akan dilakukan penyiraman cairan anti bakteri terlebih dahulu agar sampah tersebut tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap.”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana pencatatan pengawasan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa:

“Pengumpulan sampah yang dilakukan pada setiap masing-masing penampungan sampah belum dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa penampungan sampah yang sampahnya tidak diangkut ketempat penampungan sampah. Hal ini dapat membuat pihak dinas tidak ada keringanan khusus untuk memberi toleransi kepada masyarakat untuk membayar retribusi persampahan/kebersihan.”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana pencatatan pengawasan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“Dalam pemungutan retribusi persampahan/kebersihan juga pihak dinas tidak memberikan bukti pembayaran baik berupa kartu atau karcis pembayaran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat yang sudah atau belum membayar uang retribusi persampahan/kebersihan. Masyarakat bertanggung juga karena tidak pihak dinas langsung yang turun tangan dalam pemungutan retribusi persampahan/kebersihan maka masyarakat tidak bias menyampaikan segala keluhan sehingga pihak dinas tidak dapat merasakan apa yang masyarakat rasakan”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana pencatatan pengawasan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“permasalahannya disini ya kerja dengan lokasi yang menimbulkan bau menyengat apalagi disaat musim penghujan tiba masih saja tercium dan tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan pada saat bernafas. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lapangan ditemukan, bahwa proses penyiraman pada saat sampah masuk ke TPA tidak semuanya dilakukan penyiraman, mengingat cairan anti bakteri yang terbatas. Dengan kondisi demikian, usaha untuk mengurangi bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah tidak maksimal”.

Hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Maret 2019, dengan pertanyaan apakah ada membuat catatan permasalahan dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“Dari laporan yang diberikan oleh pengawas dan mandor TPA maka kami pihak dinas segera membuat laporan atas apa yang mereka sampaikan, baik itu jumlah pengelolaan sampah maupun permasalahan yang lainnya terkait pengelolaan sampah. Kami sebagai pihak dinas memang bertugas

membuat laporan mengenai persampahan ini yang kemudian akan dijadikan arsip”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan apakah ada membuat catatan permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“saya harus rutin membuat laporan untuk kegiatan di TPA ini, akan tetapi laporan yang saya buat biasanya berbentuk lisan bukan tulisan, karena setiap saat ada saja masalah dan kendala yang ditemukan dalam pengelolaan sampah ini terutama masalah akomodasi pengelolaan sampah yang selalu dalam keadaan rusak”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan apakah ada membuat catatan permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“saya membuat laporan jumlah sampah yang masuk setiap harinya karena saya bekerja sebagai operator timbangan, oleh karena itu setiap harinya jumlah sampah yang masuk ada laporannya kemudia diserahkan langsung kepihak dinas melalui pengawas maupun mandor TPA”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara FajarKota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan apakah ada membuat catatan permasalahan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“saya ada juga membuat laporan tapi memang lebih kepada laporan lisan, karena saya bertugas tidak tetap dilapangan satu kelapangan lainnya maka laporan yang disampaikan lebih banyak menggunakan media alat komunikasi seperti handphone ”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa memang adanya tumpukan sampah sudah hamper seperti gunung sampah yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada dan tinggal disekitar TPA tersebut. Akan tetapi pihak TPA meyakinkan sampah tersebut sudah disemprot dengan anti bakteri sehingga sudah sedikit aman.

B.3. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir sampah yang dilakukan di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru kemudian diolah. Pengolahan sampah anorganik yaitu dari tumpukan sampah yang berada di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru sudah sampai tahap menghasilkan gas metan. Gas metan yang dihasilkan dipakai untuk memasak air oleh petugas yang berjaga di lokasi TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru. Dalam perencanaannya gas metan ini akan diolah lebih lanjut dan di distribusikan ke rumah-rumah warga sekitar, agar dapat dipergunakan sebagai bahan bakar dalam memasak, yaitu pengganti LPG. Namun, sampai saat ini, perencanaan tersebut belum terealisasi dengan baik, karena keterbatasan biaya, peralatan dan sumber daya manusia yang handal dibidang gas metan tersebut. Apabila instalasi sudah terpasang, gas metan akan dapat dialirkan kerumah warga melalui pipa dan dapat dipergunakan untuk memasak. Dengan adanya energi dari gas metan ini, maka dapat menghemat penggunaan LPG yang saat ini dipasaran harganya semakin mahal saja. Dengan adanya energi yang terbarukan dan lebih murah, maka dapat dijadikan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

Hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap hasil dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“Pembuangan akhir sampah yang dilakukan di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru kemudian diolah. Pengolahan sampah anorganik yaitu dari tumpukan sampah yang berada di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru sudah sampai tahap menghasilkan gas metan. Gas metan yang dihasilkan dipakai untuk memasak air oleh petugas yang berjaga di lokasi TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru. Dalam perencanaannya gas metan ini akan diolah lebih lanjut dan di distribusikan ke rumah-rumah warga sekitar, agar dapat dipergunakan sebagai bahan bakar dalam memasak, yaitu pengganti LPG. Namun, sampai saat ini, perencanaan tersebut belum terealisasi dengan baik, karena keterbatasan biaya, peralatan dan sumber daya manusia yang handal dibidang gas metan tersebut. Apabila instalasi sudah terpasang, gas metan akan dapat dialirkan kerumah warga melalui pipa dan dapat dipergunakan untuk memasak. Dengan adanya energi dari gas metan ini, maka dapat menghemat penggunaan LPG yang saat ini dipasaran harganya semakin mahal saja. Dengan adanya energi yang terbarukan dan lebih murah, maka dapat dijadikan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan masyarakat”.

Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan menjadi suatu yang lebih berguna. Proses disini adalah pengolahan sampah yang dibuang di TPA yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah. Dalam melakukan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan akhir (TPA) Muara fajar Kota Pekanbaru menggunakan sistem *sanitary landfill* yaitu *Sanitary landfill* adalah sistem TPA dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan.

Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi, di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi. Penanganan sampah dengan menggunakan *sanitary landfill* tetap memiliki buangan berupa berbagai macam bentuk gas serta cairan. proses pengolahan sampah yang dilakukan dengan sistem konversi yang keseluruhannya dikenal dengan proses *Sanitary Landfill* tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kendala sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal pengolahan sampah yang menghasilkan gas metan. Selain itu, peralatan yang tidak memadai dan ditemukan beberapa alat yang rusak tentu menjadi penghambat dalam proses pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2019 bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap hasil dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“kami disini sudah melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi kami terkendala masih banyak ditemukan terkait banyaknya kerusakan yang terjadi antara lain alat berat yang memiliki fungsi penting dalam mengelola sampah sehingga tidak dapat menimbun seperti sekarang ini. Akan tetapi respon pihak dinas dari kemarena kami sudah memberikan laporan belum ditanggapi dan dilakukan perbaikan alat berat yang rusak sehingga banyak kami yang terkendala untuk melakukan pengelolaan sampah. Pihak pengawas pun tidak pernah mau datang untuk melihat langsung kendala atau permasalahan yang terjadi saat ini di TPA”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Maret 2019, dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap hasil dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“pelaksanaan tugas kami sudah dilakukan sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan, kami hanya membuat pelaporan atas permasalahan yang terjadi atau pelaporan hasil kinerja lapangan setiap harinya”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap hasil dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau terjadi permasalahan dalam penimpangan sampah ini palingan hanya sedikit kerusakan program computer ataupun printer untuk kertas bukti penimbangan, kalau masalah besar lainnya tidak ada. Kalaupun terjadi permasalahan tinggal membuat laporan saja kepada pihak dinas kemudian dilakukan perbaikan, tapi memnag kenalanya lama untuk melakukan perbaikan tersebut”.

Hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Maret 2019, dengan pertanyaan bagaimana melakukan perbandingan pengawasan dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“kalau menurut saya jika terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah ini maka akan melakukan pelaporan kepada pihak atasan yang kemudian dikoordinasikan untuk melakukan perbaikan atau penyelesaian atas permasalahan yang terjadi tersebut. Jadi pengawasan dilakukan baik ada atau tidak permasalahan yang terjadi karena akan banyak informasi yang diperoleh dari pengawasan tersebut”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaiman melakukan perbandingan pengawasan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“permasalahan yang terjadi ini memang sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut menangani karena sedikit banyaknya saya yang lebih mengetahui keadaan TPA ini karena menjadi tugas utama saya untuk

selalu mengawasi TPA ini. Jadi jika terjadi permasalahan maka saya orang pertama yang akan mengetahuinya terlebih dahulu, oleh karena itu penting bagi saya selalu membuat laporan perbandingan dari hasil pengawasan saya setiap harinya yang akan saya sampaikan kepada pihak dinas”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaiman melakukan perbandingan pengawasan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“saya membuat laporan jumlah sampah yang masuk setiap harinya karena saya bekerja sebagai operator timbangan, oleh karena itu setiap harinya jumlah sampah yang masuk ada laporannya kemudia diserahkan langsung kepihak dinas melalui pengawas maupun mandor TPA”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara FajarKota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaiman melakukan perbandingan pengawasan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“saya selalu berkoordinasi dengan mandor TPA jika ada permasalahan yang terjadi, sehingga jika terjadi permasalahan atau tidak saya kan tetap datang ke TPA untuk melakukan pengawasan pengelolaan sampah tersebut karena ada laporan yang akan saya buat”.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa memang adanya kerusakan jalan untuk alat berat yang akan melakukan pengangkutan sampah sehingga tidak tertimbun. Alat berat pun tidak ada yang beropersional karena dalam keadaan rusak. Dan saat ini TPA Muara Fajar hanya dijadikan untuk penimbangan sampah dan penyemprotan anti bakteri saja akan tetapi pembuangan sampah dilakukan pada TPA yang baru dibuat oleh pihak dinas tidak jauh dari TPA Muara Fajar.

B.4. Pengelolaan Sampah

Dalam melakukan pengolahan sampah di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru juga melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, pengomposan ini membantu mengurangi sampah di TPA walaupun hanya sedikit dan pengolahan dengan melakukan pengomposan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan, pembusukan dari tumbuhan, dan lain-lain dilakukan pengolahan dengan pengomposan. Melalui proses pengomposan sampah organik yang bersifat mudah terurai dapat berubah bentuk menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan. Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang ramah lingkungan dari pada pupuk kimia buatan yang diproduksi oleh industri pupuk pada umumnya.

Produk yang dihasilkan dari sistem pengolahan sampah adalah pupuk. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos adalah hasil penguraian secara parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat oleh berbagai populasi mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik. Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis. Unit pengomposan memang sudah ada di kota Pekanbaru, tetapi jumlah pupuk kompos yang dihasilkan hanya sedikit, yaitu berjumlah maksimal 1 (satu) ton saja. Keterbatasan unit pemasaran dan unit pembungkusan membuat pupuk kompos yang dihasilkan tidak diperjual belikan, tetapi hanya dipergunakan untuk memupuk tanaman yang berada di taman, dan sepanjang ruas jalan kota Pekanbaru. Produk pupuk kompos yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah sudah diketahui oleh masyarakat sekitar TPA Muara

Fajar Kota Pekanbaru, tetapi untuk mendapatkan pupuk kompos dengan jumlah 5 kg dikenakan biaya Rp. 15.000. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pupuk kompos adalah untuk kepentingan pribadi petugas di lapangan. Hal ini berarti, uang yang dikeluarkan tidak masuk kedalam pendapatan asli daerah (PAD). Tentu saja, kondisi seperti ini merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah mengingat biaya pembangunan TPA yang cukup besar. Perlu adanya sikap tegas dan pengawasan yang baik terhadap praktik pungutan uang di lapangan dan pembenahan sistem pengolahan yang baik agar pupuk kompos yang menjadi produk bernilai ekonomis dan dapat dijual untuk menambah pendapatan asli daerah yang akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah harus dilihat secara tulisan maupun lisan, hal ini bertujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai tersebut dan masalah yang terjadi didalam pengelolaan sampah dapat diatasi dengan baik. Melakukan laporan yang dibuat dapat diketahui tingkat pendapatan serta perkembangan masalah yang terjadi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam membuat laporan tersebut pihak Dinas telah menunjuk langsung pegawai yang memegang tanggung jawab membuat laporan tersebut. Dan jika terdapat permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan sampah tersebut baru akan ditindaklanjuti untuk perbaikan”.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“tingkat ketergantungan sampah di Kota Pekanbaru hingga saat ini baru mencapai 50 persen saja. Setiap hari menurutnya hanya setengah sampah di Kota Pekanbaru yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun ia juga mengaku tidak dapat berbuat banyak. Hal itu tidak lepas dari masih jauhnya dari ideal armada truk pengangkut sampah yang dimiliki DLHK dibandingkan dengan produksi sampah kota pekanbaru. Dengan armada yang ada sekarang, baru 50 persen terangkut. Kendalanya adalah jumlah armada dan anggaran. Jumlah penduduk terus bertambah, produksi sampah juga meningkat. Tapi kami terkendala di kendaraan pengangkut dan anggaran operasionalnya. Saat ini hanya ada sekitar 63 unit armada, itupun 5 unit sudah rusak pula. TPA Muara Fajar hanya menerima rata-rata 380 ton sampah perhari. Padahal timbunan atau produksi sampah kota Pekanbaru setiap harinya mencapai 720 ton. Jumlah penduduk bertambah, jumlah sampah pasti bertambah. Apalagi kita baru saja melakukan pengembangan wilayah, ada banyak kelurahan baru, itu artinya produksi sampah terus meningkat. Kalau standar pelayanan minum sesuai sekarang itu 56 persen, harusnya tahun ini sudah mencapai 70 persen. Tapi armada kita tidak mencukupi”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau terjadi permasalahan dalam penimbangan sampah ini palingan hanya sedikit kerusakan program computer ataupun printer untuk kertas bukti penimbangan, kalau masalah besar lainnya tidak ada. Kalaupun terjadi permasalahan tinggal membuat laporan saja kepada pihak dinas kemudian dilakukan perbaikan, tapi memang kenalnya lama untuk melakukan perbaikan tersebut”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“kalaupun terjadi permasalahan di TPA saya selalu bersama mandor TPA untuk mencari solusi dan membuat laporan pengawasan permasalahan yang terjadi ini kepada pihak dinas. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi ini akan segera ditangani”.

Hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Maret 2019, dengan pertanyaan bagaimana penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“kalau adanya laporan permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan sampah maka akan langsung dibuatkan laporan untuk segera ditangani dan pengelolaan sampah akan bekerja kembali. Akan tetapi tindakan perbaikan ini biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena ada berbagai proses yang akan dilakukan, apabila pihak atasan sudah memiliki solusi tepat maka akan segera dilakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“permasalahan yang terjadi ini memang sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut menangani karena sedikit banyaknya saya yang lebih mengetahui keadaan TPA ini karena menjadi tugas utama saya untuk selalu mengawasi TPA ini. Jadi jika terjadi permasalahan maka saya orang pertama yang akan mengetahuinya terlebih dahulu, oleh karena itu penting bagi saya selalu membuat laporan perbandingan dari hasil pengawasan saya setiap harinya yang akan saya sampaikan kepada pihak dinas”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau terjadi permasalahan dalam penyimpangan sampah ini palingan hanya sedikit kerusakan program computer ataupun printer untuk kertas bukti penimbangan, kalau masalah besar lainnya tidak ada. Kalaupun terjadi permasalahan tinggal membuat laporan saja kepada pihak dinas kemudian dilakukan perbaikan, tapi memang kenalnya lama untuk melakukan perbaikan tersebut”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“kalaupun terjadi permasalahan di TPA saya selalu bersama mandor TPA untuk mencari solusi dan membuat laporan pengawasan permasalahan yang terjadi ini kepada pihak dinas. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi ini akan segera ditangani”.

Dari hasil observasi diketahui memang adanya armada yang mengalami kerusakan yang cukup banyak dan tidak segera dilakukan perbaikan sehingga menjadi terkendala dalam pengangkutan sampah. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada penumpukan sampah di TPS dan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara tepat waktu sedangkan pengangkutan sampah harus dilakukan setiap hari.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah pada tanggal 11 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana tindakan pembersihan wilayah pembuangan sampah, yang menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengolahan sampah di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah juga melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, pengomposan ini membantu mengurangi sampah di TPA walaupun hanya sedikit dan pengolahan dengan melakukan pengomposan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan, pembusukan dari tumbuhan, dan lain-lain dilakukan pengolahan dengan pengomposan. Melalui proses pengomposan sampah organik yang bersifat mudah terurai dapat berubah bentuk menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan. Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang ramah lingkungan dari pada pupuk kimia buatan yang diproduksi oleh industri pupuk pada umumnya”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana tindakan pembersihan wilayah pembuangan sampah diketahui bahwa :

“butuh waktu lebih untuk mengangkut sampah setiap hari. Tidak hanya itu jumlah pekerja tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari yaitu melayani pengangkutan sampah dengan jangkauan wilayah Kota Pekanbaru yang begitu luas dengan jutaan penduduk. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya. Jangan heran jika selalu ada sampah yang masih tertumpuk di tepi jalan. Seakan-akan selalu saja ada sampah berlebihan. Karena faktanya setengah sampah di Pekanbaru ini tidak terangkut oleh truk armada angkut sampah”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana tindakan pembersihan wilayah pembuangan sampah diketahui bahwa :

“kami hanya bisa menumpuk sampah yang terus berdatangan saja, akan tetapi karna TPA Muara Fajar ini sudah terlalu banyak penumpukan sampah dan belum bisa diolah maka ada kewenangan baru untuk membuang sampah pada TPA baru jadi disini hanya untuk menimbang dan penyemprotan anti bakteri saja”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana tindakan pembersihan wilayah pembuangan sampah, yang menyatakan bahwa :

“masalah pembersihan memang tidak bisa dilakukan secara efektif terutama wilayah TPA ini sudah banyak sampah yang menumpuk, tuntut melakukan pembersihan pun banyak akan menggunakan alat operasional yang mana saat ini sedang mengalami kerusakan jadi susah kami untuk melakukan pembersihan wilayah TPA ini”.

Hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Maret 2019, dengan pertanyaan bagaimana mencari solusi permasalahan dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“sampai pada saat ini tidak banyak solusi yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah ini karena banyak kendalanya antara lain alat operasional yang banyak rusak sehingga sampah yang menumpuk sudah terlalu banyak dan jumlah tenaga kerja yang minim yang tidak bisa optimal mengolah sampah menjadi kompos dan juga masalah dana operasional yang digunakan untuk mengelola sampah”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana mencari solusi permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“kalau saya sebagai mandor permasalahan yang terjadi coba saya diskusikan dengan pihak dinas, saya juga ada memberikan solusi tetapi tetap mereka yang memutuskan dan merencakana, jadi kami hanya memberi laporan saya terkait permasalahan yang terjadi”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan pertanyaan bagaimana mencari solusi permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau solusi ya kami tidak banyak bisa mengambil tindakan karena kami sebagai operasional yang melakukan kegiatan pengolahan sampah. Permasalahan yang terjadi biasanya langsung ditanggapi tetapi tindakan perbaikan yang agak sedikit lama karena harus menunggu keputusan atasan dan dana yang disediakan”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 15 Maret 2019 dengan

pertanyaan penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“solusi yang terjadi di TPA ini hanya terkait masalah alat operasional yang sering terjadi kerusakan sehingga pengolahan sampah jadi terhambat jadi kami yang mengetahui permasalahan yang terjadi hanya memberikan laporan dan solusinya orang dinas yang berwenang memberikan keputusannya jadi ya sabar saja lah kalau lama perbaikannya”.

Dari hasil observasi diketahui bahwa sampah yang sudah menumpuk di TPA Muara Fajar Pekanbaru ini tidak ada dilakukan pengolahan dengan alasan alat berat yang rusak sehingga sampai sekarang ini sampah yang menumpuk tersebut dikelola. Hal ini tentu saja menambah resah untuk kedepannya karena tidak dapat ditangani dengan baik dan pekerjaan di TPA Muara Fajar tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

C. Faktor Penghambat Dalam Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berikut ini akan diuraikan mengenai hambatan yang terjadi serta upaya yang dilakukan dalam Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yaitu :

Hambatan yang dihadapi oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah antara lain :

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu sistem. Sumber daya manusia menjadi penggerak suatu sistem. Tanpa

adanya sumber daya manusia yang terampil memiliki kompetensi yang handal dibidangnya dengan didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai akan dapat mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan suatu sistem. Petugas TPA Muara Fajar belum cukup dari segi jumlah dan kualitas. Walaupun sudah dibekali dengan pelatihan dalam proses pengolahan sampah di TPA Muara Fajar tetapi dari segi latar belakang pendidikan tenaga honorer terdapat 2 (dua) orang hanya tamatan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, produk yang dihasilkan berupa gas metan tentu saja tidak dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik karena sumber daya manusia yang membidangi masalah tersebut hanya berjumlah 1 (satu) orang saja dan sering sekali tidak masuk kerja. Dengan demikian sistem pengolahan sampah tentu saja tidak berjalan dengan baik karena sumber daya manusia yang dibutuhkan belum memadai. Perlu adanya penambahan dan perekrutan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi dan jumlahnya agar sistem pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana prasana merupakan unsur pendukung dan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu sistem. Sarana prasana yang dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pengolahan sampah di Kota Pekanbaru. Sarana prasana seperti alat berat yang berguna dalam proses pendataran sampah dan penimbunan tanah tidak memadai. Alat berat yang dimiliki berjumlah 10 unit dengan

kondisi 5 diantaranya rusak berat, 4 unit rusak ringan dan 1 unit kondisi baik. Dalam hal ini, hanya 1 (satu) unit saja yang berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam proses penimbunan sampah yang di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru. Dengan demikian, langkah perawatan dan perbaikan terhadap peralatan perlu untuk dilakukan, agar sistem pengolahan sampah tetap berjalan. Selain itu penerapan teknologi modern di TPA juga harus di perhatikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan juga Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah dalam melakukan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga nantinya sampah tidak lagi menjadi barang yang tidak berguna, melainkan justru menjadi barang yang bernilai ekonomis.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kemudian hasil (output) yang dihasilkan belum maksimal dimanfaatkan. Output dari sistem pengolahan sampah berupa gas metan digunakan oleh petugas TPA saja dan pupuk kompos hanya digunakan untuk memupuk tanaman yang berada di taman dan sepanjang ruas jalan Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan suatu sistem semua sub-sub sistem saling berkaitan dan mempengaruhi. Apabila salah satu sub sistem tidak berjalan, maka sistem keseluruhannya juga tidak dapat berjalan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai dilihat dari segi jumlah dan kualitas, kemudian sarana prasarana yang tidak didukung dengan kegiatan perawatan dan perbaikan alat, sehingga pengolahan sampah di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru terhambat karena kondisi peralatan yang rusak.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Menggalakkan penyuluhan terhadap para masyarakat agar lebih bijak untuk membuang dan memanfaatkan sampah sehingga tidak terlalu banyak sampah yang dibuang.
2. Diadakannya penyesuaian terhadap daya tampung TPA sehingga sampah terus dapat diproses dan tidak menyebabkan timbunan gunung sampah.
3. Mengadakan pertemuan secara berkala antara pengawas dengan mandor sehingga dapat menemukan cara untuk segera memproses sampah yang semakin menumpuk.
4. Sebaiknya dilakukan perbaikan atau teknik pengolahan sampah yang lebih efektif sehingga sampah tidak menjadi lebih bertumpuk sehingga akan susah untuk mengolahnya.
5. Pihak Dinas harus cepat tanggap atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnistrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media Jogjakarta
- Ahmad Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofjan, 2007. *Manajemen Pemasaran*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Basu Swastha Dharmmesta, T. Hani Handoko, 2006, *Manajemen Pemasaran “ Analisa perilaku konsumen“*, Edisi pertama cetakan ketiga, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Ehrenberg, Ronald G., dan Smith, Robert S, 2003. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Eight Edition*. Pearson Education, Inc. New York City.
- Gie The Liang, 2000, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia; suatu analisa tentang masalah-masalah desentralisasi dan cara-cara penyelesaiannya*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta
- Hamidi Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, *Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II*, Cetakan I, Dahara Prize, Semarang
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kaho Joseph Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia; identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*, Edisi I, Cetakan IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Koentjoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Murti Sumarni dan Salamah W. 1995. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi Offset.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ndraha, Taqliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.*” Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan:Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.